

Peradilan administrasi perpajakan di Indonesia dan hubungannya dengan UU No.5 tahun 1986

Edwar Harmen, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20204435&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Dalam kegiatan Administrasi Perpajakan kemungkinan terjadinya perselisihan perpajakan tetap ada. Perselisihan ini berpokok pada beban pajak dan berpangkal pada tindakan administrasi perpajakan. Berdasarkan pasal 23 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tindakan administrasi perpajakan yang bisa jadi pangkal perselisihan perpajakan adalah surat keteapan pajak, surat ketetapan pajak tambahan, surat pemberitahuan, surat ketetapan kelebihan pembayaran pajak dan pemotongan pihak ketiga, terhadap hal ini dapat diajukan kelembaga keberatan dan banding.